



Rencana Kerja Tahun 2020

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



PENDAHULUAN

Renja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Renja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Renja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



PENUTUP

Renja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN



REKAP RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Renja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 2 menyebutkan bahwa Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi :

- a. tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- b. tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD; dan
- c. tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Terkait dengan kewajiban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah (SKPD) yaitu untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Renja SKPD merupakan penjabaran Renstra SKPD yang mengacu pada RKPD.

Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020 bertujuan agar tersedianya suatu dokumen perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran untuk Tahun 2020 yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dalam Bidang Perumahan dan Pemukiman sehingga diharapkan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana dasar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat terlaksana secara terpadu dan sinergis, guna mencapai sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah dan dokumen Rancangan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Dengan demikian program-program prioritas itu akan terlaksana secara koordinatif dan kooperatif.

KEPALA DINAS,



Ir. H. MOH. YANUAR, MP
NIP. 19570501 198301 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-5
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan	I-8
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	II-6
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	II-9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-20
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	III-2
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-5
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Catatan penting.....	IV-1
4.2 Kaidah Pelaksanaan.....	IV-1
4.3 Rencana Tindak lanjut.....	IV-2

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, merupakan titik tolak pelaksanaan perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi pemerintahan daerah.

Dengan adanya PP nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Perda no 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten. Dimana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan. sebagai salah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan).

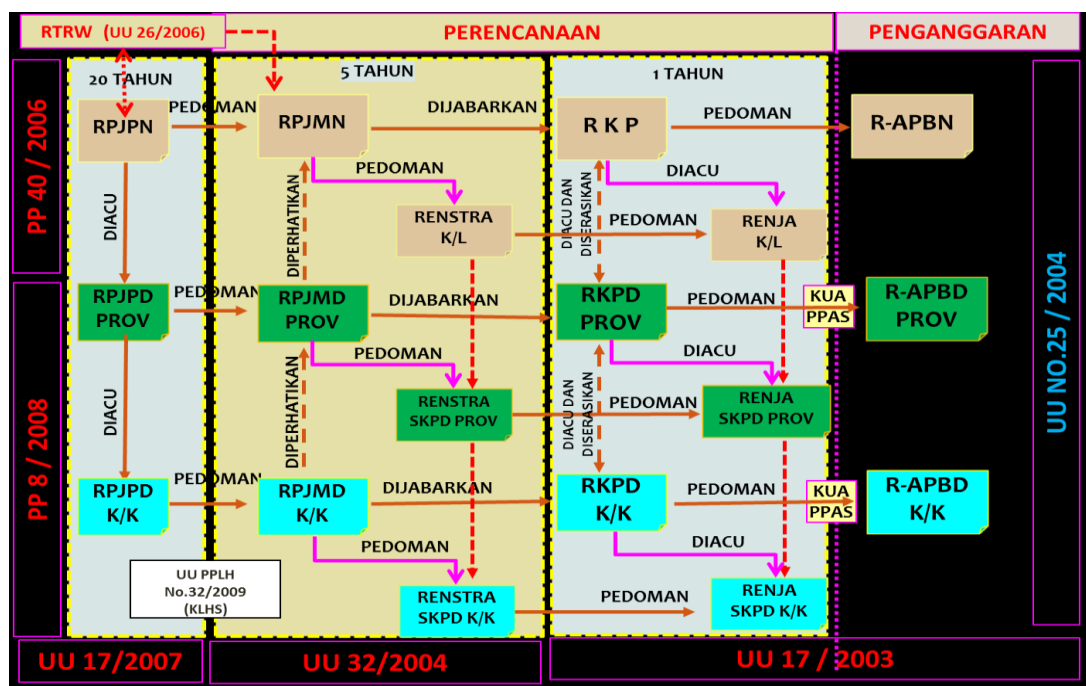
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan

kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja OPD merupakan penjabaran Renstra OPD yang mengacu pada RKPD. Renja OPD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran.

Dengan demikian, maka sebagai langkah awal proses perencanaan pembangunan tahunan Provinsi Banten dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Provinsi Banten Tahun 2020 dimana setiap SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi dan berpedoman pada Renstra-OPD.

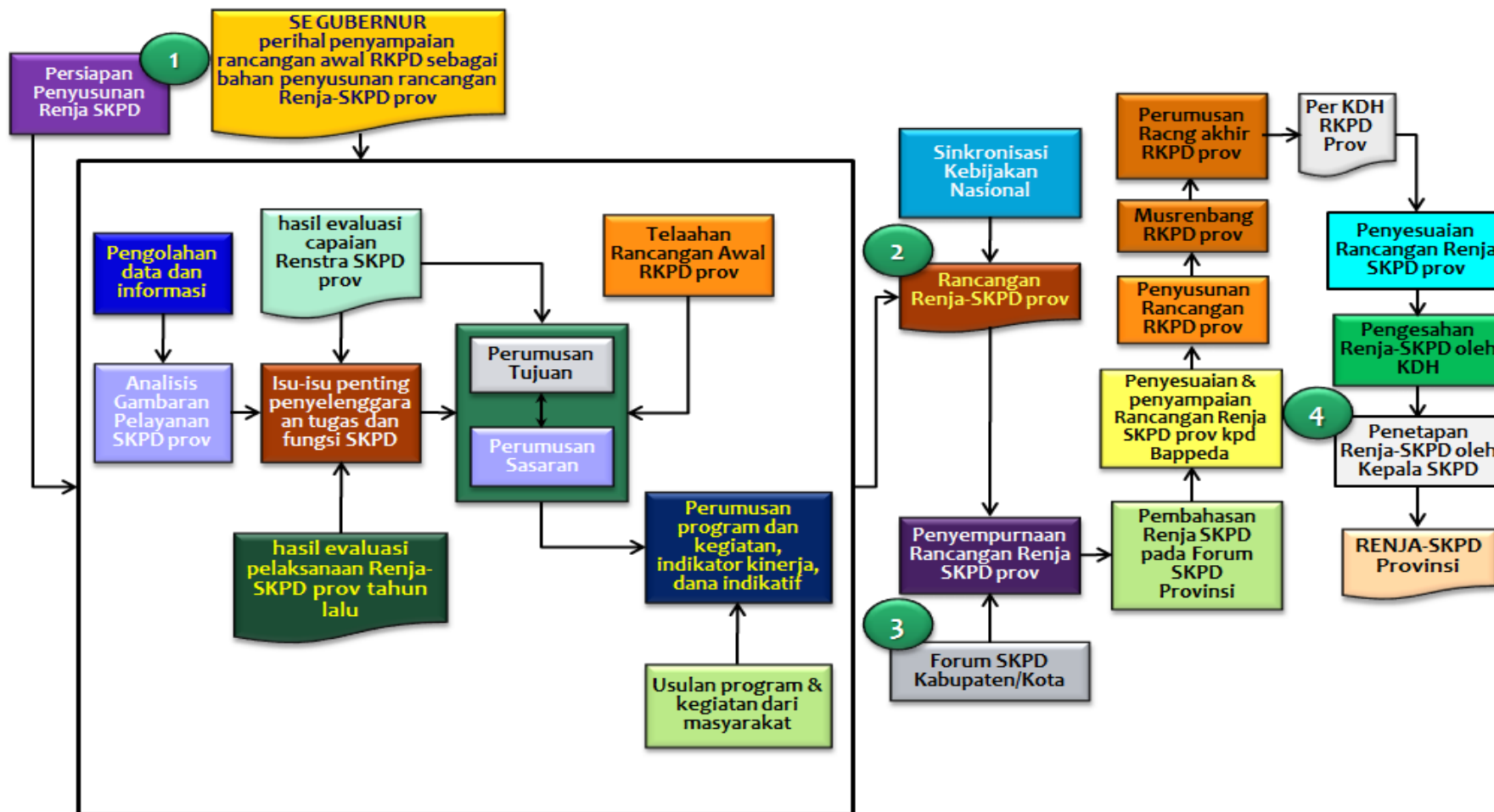
Adapun keterkaitan antar dokumen dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan antar dokumen dalam sistem perencanaan pembangunan nasional

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten dalam hal ini sebagai satuan kerja Pemerintah Propinsi serta sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan susunan Perangkat daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan. Maka kegiatan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Bidang bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan Provinsi Banten merupakan wujud dari tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.



Gambar 1.2 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Provinsi

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelayanagunaan Aparatur Negara ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah ;
44. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
45. Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Banten;

46. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
47. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020 yakni tersedianya suatu dokumen rancangan awal perencanaan program, kegiatan dan anggaran untuk tahun 2020 yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dengan demikian dokumen Renja dimaksud dapat dijadikan rancangan awal acuan dan pegangan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten dan seluruh jajarannya selama periode tahun 2020 dalam melaksanakan pembangunan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman secara efektif dan efisien.

Kegiatan Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2020 mencakup kegiatan koordinasi dan konsultasi pembangunan bidang urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang melibatkan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Banten.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Terencananya program pembangunan sarana dan prasarana dasar OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten secara terpadu dan sinergis, guna mencapai sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten. Dengan demikian program-program prioritas itu akan terlaksana secara koordinatif dan kooperatif.

2. Tersusunnya Rancangan Program/ Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2020 disusun dengan sistematika penyajian dan garis besar isi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2020.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

Memuat rangkaian Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2019 dan perkiraan capaian Tahun 2020 yang mengacu pada APBD Tahun 2020 yang sudah disyahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, kemudian digambarkan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun-tahun sebelumnya hingga akhirnya dapat disusun Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD dan Review terhadap RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan kebijakan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2020 yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. Selanjutnya disusun

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2020.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dengan disertai rencana pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2020.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2020.

BAB II

EVALUASI

PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra bidang Perumahan, Kawasan permukiman dan Cipta Karya Tahun 2019 dan rencana pencapaian target Renja Tahun 2020 telah menggunakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022, sehingga untuk evaluasi akan diperhitungkan terhadap target Renja Tahun 2019.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat melalui Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 dan Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2020) seperti dalam tabel sebagai berikut:



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2017-2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Keg. s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
	Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Terselenggaranya Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	100%	Tidak diperhitungkan dalam periode Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017- 2022	100%	95,94 %		100%	100%	100%
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%		100%	100 %		100%	100%	100%
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	100%		100%	100 %		100%	100%	100%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100%		100%	100 %		100%	100%	100%
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Terselenggaranya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	100%		100%	99,65 %		100%	100%	100%



Peningkatan Kapasitas Aparatur	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%		100%	100 %		100%	100%	100%
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	100%		100%	64,88 %		100%	100%	100%
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Kearsipan dan Perpustakaan	100%		100%	100 %		100%	100%	100%
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B	Terselenggaranya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B	100%		100%	87,72 %		100%	100%	100%
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	Terselenggaranya Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	100%		100%	100 %		100%	100%	100%
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	403,76		58,4	100 %				



Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	Terselenggaranya Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	100%		100%	100 %		100%	100%	100%
Penatagunaan Kawasan Permukiman	Terselenggaranya Penatagunaan Kawasan Permukiman	100%		100%	100 %		100%	100%	100%
Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	Terselenggaranya Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	100%		100%	99,84 %		100%	100%	100%
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	Terselenggaranya Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	100%		100%	97,83 %		100%	100%	100%
Penatagunaan Pengembangan Perumahan	Terselenggaranya Penatagunaan Pengembangan Perumahan	100%		100%	99,60 %		100%	100%	100%
Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	100%		100%	100 %		100%	100%	100%
Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	100%		100%	99,85 %		100%	100%	100%
Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	100%		100%	99,53 %		100%	100%	100%



Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan	100%		100%	0,00		100%	100%	100%
Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	100%		100%	100%		100%	100%	100%
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	Terselenggaranya Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	100%		100%	99,11 %		100%	100%	100%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B	Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B	100%		100%	99,88 %		100%	100%	100%
Penataan Sarana dan Prasarana KP3B	Terselenggaranya Penataan Sarana dan Prasarana KP3B	100%		100%	99,76 %		100%	100%	100%
Pengelolaan gedung strategis Provinsi	Terselenggaranya Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi	100%		100%	99,61 %		100%	100%	100%
Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	Terselenggaranya Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	100%		20%	100 %		100%	100%	100%

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja

Permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018 bidang perumahan dan cipta karya sebagian besar terkendala waktu pelaksanaan pekerjaan yang salah satunya disebabkan oleh permasalahan pelelangan seperti batal lelang dan gagal lelang. Selain itu, disebabkan pula oleh batal kontrak dan putus kontrak dengan penyedia, permasalahan lahan hingga adanya pekerjaan yang melewati Tahun anggaran 2018.

Solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir sisa anggaran untuk periode ke depan adalah dengan melakukan pelelangan dini dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Lebih matang dalam hal perencanaan (kesiapan lokasi, DED, penetapan HPS)
- Persiapan anomali cuaca hujan ekstrim di beberapa lokasi pekerjaan;
- Melakukan Kajian mendalam peraturan yang terkait dengan pekerjaan;
- Penyelesaian pembangunan agar dapat segera berfungsi (rounding up);
- Meningkatkan koordinasi pelaksanaan dengan Kab/ kota dan unit satker lainnya;
- Perancangan distribusi pegawai seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran dan beban kerja;
- Memperhatikan paket pekerjaan dengan anggaraan besar dan paket pekerjaan kecil tetapi menyebar di banyak lokasi;

2.1.2 Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2019

Secara garis besar perkiraan realisasi capaian target Renstra sampai dengan Tahun 2019 dapat dikatakan baik (asumsi program kegiatan Tahun 2019 dapat dilaksanakan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran), pada beberapa kegiatan perlu mendapat perhatian dan dukungan penganggaran sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi (dukungan target SDGs);
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh (dukungan target SDGs dan penganggaran);

Terdapat beberapa target Renstra yang perlu dilakukan pangkajian ulang (*review*), karena target terlalu rendah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih, target 72,75% dan realisasi mencapai 74,90% (102,96%). Data berdasarkan capaian dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
2. Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (target renstra 3,73 kawasan; sampai dengan Tahun 2018 sudah mencapai 5,5 kawasan (147,36%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berkaitan dengan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum khususnya mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten memiliki indikator SPM dalam bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang Standar pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/ Kota.

Dalam SPM bidang perumahan rakyat, Pemerintahan daerah provinsi menyelenggarakan pelayanan urusan perumahan yang terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian tahun 2009 – 2025.

a. Jenis pelayanan dasar dan indikator dari SPM bidang Perumahan Rakyat meliputi:

- rumah layak huni dan terjangkau;

Indikator dari rumah layak huni dan terjangkau adalah:

- cakupan ketersediaan rumah layak huni;
- cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau.
- lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

b. Nilai SPM bidang perumahan rakyat terdiri dari:

- (i) Indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 100 % (seratus persen) dan untuk indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 70 % (tujuh puluh persen).
- (ii) Indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) sebesar 100 % (seratus persen).

c. Batas waktu pencapaian tahun 2009 – 2025.

Adapun target SPM pada Tahun 2025 merupakan target dari Kementerian Negera Perumahan Rakyat untuk Provinsi. Untuk pelaksanaan di Provinsi Banten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Langkah yang diambil dalam rangka mendukung target SPM ini adalah dengan melaksanakan program kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2010, berupa pembangunan Jalan Lingkungan Paving blok dan drainase, Rehab Rumah, Pembuatan MCK di 8 Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten. Tahun 2017, direncanakan akan dilaksanakan peningkatan rumah tidak layak huni sebesar 97 unit dan akan direalisasikan sebesar 89 unit.

2. Pembinaan dan Penataan Perumahan

Merupakan langkah pembinaan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang Standar pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/ Kota, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/ kota untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk rumah layak huni melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan;
- b. Melakukan pemutakhiran data rumah secara berkala dari kabupaten/kota;
- c. Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah layak huni kepada Menteri.

Peraturan terbaru mengenai pedoman SPM merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana, dalam pasal 8 disebutkan bahwa Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat daerah provinsi terdiri atas :

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi

Peraturan terbaru juga mengenai pedoman SPM merujuk kepada Peraturan Menteri PUPR No.29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana,

- a. Dalam pasal 5, disebutkan bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Air Limbah Domestik dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan dua system pengelolaan, yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

- b. Dalam pasal 6, disebutkan bahwa Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar
- Kuantitas: Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik.
 - Kualitas Pelayanan Dasar :
 1. Kualitas pelayanan minimal air limbah domestic melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan
 2. Kualitas pelayanan minimal air limbah domestic melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Tabel 2.2. Jenis Pelayanan Dasar, Indikator, Nilai Dan Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar skala Provinsi	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1.Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100 %	2009 - 2025	Dinas perumahan atau Dinas yang menangani bidang perumahan	Sesuai tata ruang dan perizinan
		2.Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70 %	2009 - 2025	Dinas perumahan atau Dinas yang menangani bidang perumahan	Tercapainya fasilitasi keterjangkauan menghuni rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2.	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum	3.Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100%	2009 - 2025	Dinas perumahan atau Dinas yang menangani bidang perumahan	Sesuai tata ruang dan perizinan

Sumber : Lampiran I Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 22/Permen/M/2008

• Status Pencapaian SPM Bidang Perumahan

1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Rumus cara perhitungan capaian SPM cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah:

$$\text{Cakupan Rumah Layak Huni} = \frac{\text{Jumlah rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$$

Keterangan:

- Pembilang
Jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum di suatu wilayah kerja, pada waktu tertentu.
 - Penyebut
Jumlah rumah di suatu wilayah Provinsi pada kurun waktu tertentu.
 - Ukuran/Konstanta Persentase (%)
2. Rumah terjangkau adalah rumah dengan harga jual atau harga sewa yang mampu dimiliki atau disewa oleh seluruh lapisan masyarakat. Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat baik untuk dimiliki maupun disewa.

Kriteria dari rumah terjangkau adalah:

1. Harga rumah dikategorikan terjangkau apabila mempunyai *median multiple* sebesar 3 atau kurang. *Median multiple* adalah perbandingan antara median harga rumah dengan median penghasilan rumah tangga dalam setahun.

Indeks Keterjangkauan

<u>Rating</u>	<u>Median Multiple</u>
Sama sekali tidak terjangkau	lebih besar atau sama dengan 5.1
Tidak terjangkau	4.1 s/d 5.0
Kurang terjangkau	3.1 s/d 4.0
Terjangkau	lebih kecil atau sama dengan 3

2. Median harga rumah berdasarkan harga rumah layak huni sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Median penghasilan rumah tangga berdasarkan penghasilan rumah tangga yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah.

Rumus cara menghitung indeks keterjangkauan dan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Indeks Keterjangkauan} &= \frac{\text{Median harga rumah}}{\text{Median penghasilan rumah tangga}} \\ \text{Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau} &= \frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu}} \times 100 \% \end{aligned}$$

3. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) adalah kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan masyarakat.

Rumus cara perhitungan capaian SPM cakupan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU:

$$= \frac{\sum \text{desa/ kelurahan yang didukung oleh Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)}}{\sum \text{Seluruh desa/ kelurahan di Propinsi Banten}} \times 100$$

Keterangan :

- Pembilang Jumlah lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meliputi : jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
- Penyebut
Jumlah lingkungan perumahan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
- Ukuran/Konstanta
Persentase (%).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- **Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD**

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berada dalam posisi cukup baik, mengingat progres realisasi menunjukkan prosentase yang cukup baik.

Hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten terletak kegiatan-kegiatan penyediaan prasarana dasar masyarakat, khususnya untuk penyediaan air bersih, serta kegiatan selain itu pada pemenuhan target nasional pada target SPM dan Target SDG's yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/ kota, tentunya saja ketersediaan anggaran menjadi point yang sangat penting yang dapat mewujudkan target-target tersebut.

Sinergitas dan koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dalam mencapai tujuan pembangunan sudah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, berupa pelaksanaan program RPIJM pada bidang keciptakaryaan.

- **Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD**

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pemenuhan infrastruktur bidang permukiman di Provinsi Banten, adalah :

1. Masih rendahnya kualitas dan tingkat pelayanan sanitasi, baik di perkotaan maupun di pedesaan.
2. Lemahnya dukungan pembiayaan pembangunan sektor perumahan & permukiman dari sisi pemerintah akibat adanya skala prioritas sektor pembangunan lain dan keterbatasan pendapatan pemerintah sehingga penanganan pembangunan perumahan permukiman dalam penyediaan prasarana dasar,

pengaturan lahan dalam skala besar serta rehabilitasi kawasan kumuh menjadi sulit direalisasikan.

3. Disisi lain pendanaannya melalui sumber pembiayaan komersial (swasta) hanya dapat melayani kebutuhan non MBR (golongan masyarakat menengah keatas), sedangkan untuk MBR perlu dibiayai oleh pemerintah.
4. Terdapat potensi sumber pembiayaan lain yang bukan dari anggaran pemerintah yang dapat dimobilisasi untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman seperti penggunaan dana pensiun, asuransi dll yang dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan jangka panjang untuk mengatasi kelangkaan dana namun memerlukan upaya melalui pengaturan dan kebijakan.

Terkait permasalahan dan hambatan yang dihadapi, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat, pemerintah kab/ kota dan SKPD lain terkait program kegiatan yang dilaksanakan. Koordinasi ini dapat dilakukan dengan cara:

- Melakukan rapat koordinasi rutin mengenai pelaksanaan kegiatan yang melibatkan kabupaten/ kota maupun SKPD lain;
- Mengirimkan surat resmi kepada pemerintah Kabupaten/ kota terkait mengenai rencana pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan agar tidak tumpang tindih.
- Mengirimkan surat resmi kepada Pemerintah Pusat mengenai dukungan infrastruktur berupa bantuan penganggaran maupun penanganan program kegiatan terkait kewenangan sesuai perundangan.
- Mengirimkan surat kepada SKPD lain yang terkait mengenai permasalahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk ditindaklanjuti (permasalahan alih fungsi lahan/ perubahan tata ruang, penurunan kualitas air permukaan, pengambilan dan perizinan air tanah berlebihan, kerusakan hutan, lahan kritis).

- Permintaan resmi mengenai data dan informasi bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (terutama data SDGs dan SPM Perumahan).
- Membentuk unit pelayanan terpadu.
- **Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);**

Dampaknya permasalahan-permasalahan ini dapat dijabarkan melalui Misi terkait dengan Pelaksanaan Pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu pada Misi Pertama dan Misi Kelima sebagai berikut:

1. *Misi Terkait (Misi Pertama),*

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah dan Kawasan yang Berwawasan Lingkungan, yang memiliki sasaran program:

- Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman

Adapun faktor penghambat dan pendorong dari sasaran ini dibagi ke dalam Infrastruktur Pemukiman sebagai berikut:

Infrastruktur Pemukiman

- ❖ Faktor Penghambat Infrastruktur Pemukiman
 - Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah
 - Arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam
 - Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi
 - Angka kemiskinan penduduk perkotaan mengalami kenaikan relatif tinggi akibat krisis finansial lokal dan global.
 - Desentralisasi
 - Persebaran penduduk di Indonesia saat ini lebih banyak terpusat di wilayah Tangerang

- Di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana justru akan membahayakan daya dukung kota, terutama di kota-kota besar.
- Kerusakan lingkungan hidup
 - Meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan.
- Daya saing kota dan demokratisasi
 - Di era globalisasi saat ini, kota-kota di Indonesia tidak hanya harus bersaing dengan kota-kota di dalam negeri semata.
 - Bentuk persaingan pun bergeser dari *comparative advantages* menuju ke era *competitive advantages*.
- Perubahan Iklim dan bencana alam
 - Meningkatnya temperatur rata-rata bumi dan meningkatnya permukaan air laut menimbulkan bahaya banjir.
 - Posisi Indonesia yang berada di kawasan *ring of fire* memerlukan perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan.
- ❖ Faktor pendorong pembangunan Infrastruktur Pemukiman
- Perlunya menetapkan target-target kinerja yang lebih jelas untuk meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di kota metropolitan/besar yang sampai saat ini masih belum menuai hasil yang optimal. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah sampai saat ini masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang masih belum memadai.
- Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi maupun antar kabupaten/kota.

- Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
- Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
- Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.
- Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
- Memenuhi backlog perumahan sebesar 6 juta unit sebagai akibat dari terjadinya penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru, rata-rata sekitar 820.000 unit rumah setiap tahunnya.
- Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan kriminalitas.
- Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (*green building*) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.
- Mendukung program pengembangan kawasan agropolitan.
- Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang infrastruktur permukiman, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

2. Misi Terkait (Misi Kelima),

Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, yang memiliki sasaran program:

- Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi;
- Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi;
- Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;

Adapun faktor penghambat dan pendorong dari sasaran misi ke-lima terfokus pada kesekretariatan dan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sebagai berikut:

Sekretariat

- ❖ Faktor penghambat pada **Sekretariat**
 - Kualitas dan produktivitas SDM belum cukup memadai, sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang dijiwai semangat kewirausahaan untuk menjadi basis bagi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan/pengguna.
 - Diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi program dan kegiatan.
 - Diperlukan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan perkembangan pembangunan dan daya kritis masyarakat yang terus berkembang.
 - Dibutuhkan langkah-langkah reformasi birokrasi yang strategis, konkret dan terintegrasi.

- Diperlukan koordinasi internal yang kuat: antarfungsi manajemen, antarsub-bidang serta memenuhi prinsip-prinsip *good governance*.
- Pengelolaan: Masih sangat birokratik belum inovatif (ala korporasi), masih bersifat manajemen proyek belum manajemen aset, masih terkesan hanya mengelola supply belum mengelola demand.
- Data aset infrastruktur nasional (pusat dan daerah) tidak lengkap.
- Diperlukan reformasi peraturan perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi.
- Diperlukan penyusunan produk-produk kajian untuk pimpinan yang sifatnya *early warning*/pemecahan masalah yang mendesak dan produk-produk yang sifatnya permintaan.

Kelembagaan dan SDM

- ❖ Faktor penghambat aspek kelembagaan dan SDM
 - Praktik penyelenggaraan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten ke depan tidak lagi diwarnai oleh sistem yang birokratis, kurang fleksibel, dengan kapasitas inovasi dan kreativitas yang masih terbatas.
 - Kegiatan pengelolaan infrastruktur masih terkonsentrasi pada aspek pembangunan, belum memperhatikan aspek pemanfaatan dan pengembangan aset.
 - Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ke depan akan semakin penting dalam menentukan keberlangsungan pengelolaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur di daerah.
 - Kapasitas institusi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten memiliki keterbatasan, seperti

ukuran organisasi yang dirasakan masih terlalu gemuk dan struktur yang belum sepenuhnya efektif.

- Kualitas dan produktivitas SDM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten saat ini belum cukup memadai, padahal secara kuantitas SDM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah melampaui kebutuhan saat ini.
- ❖ Faktor pendorong pembangunan aspek kelembagaan dan SDM
 - Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air dan permukiman di berbagai wilayah dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.
 - Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai 3 (tiga) *strategic goals* Sumber Daya Air, yaitu: kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi bagi peningkatan kualitas lingkungan.
 - Peningkatan koordinasi penyelenggaraan infrastuktur Sumber Daya Air antar tingkatan pemerintahan dan antarpelaku pembangunan.
 - Penyelenggaraan *good governance* yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.
- **Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD**

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten antara lain:

 1. Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumber daya air.
 2. Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim global

3. Pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs)
4. Pengembangan manajemen SDM termasuk kelembagaan dan teknologi bidang SDA
5. Desentralisasi dan otonomi daerah
6. Potensi pencemaran air cenderung semakin meningkat akibat limbah rumah tangga, pertanian dan industri
7. Pertumbuhan dan perkembangan lahan permukiman sebagai suatu keniscayaan akibat pertambahan penduduk.
8. Konversi lahan, perubahan pemanfaatan lahan, dan perkembangan lahan terbangun harus diantisipasi pengaruhnya terhadap keseimbangan tata ruang air.

▪ **Formulasi isu-isu penting**

Khusus untuk Tahun 2020, Isu Strategis Provinsi Banten antara lain sebagai berikut:

1. Kesenjangan Wilayah
2. Daya Saing Daerah
3. Kemiskinan dan pengangguran
4. Tata Kelola Pemerintahan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020 terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Rp11	12
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Banten	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	3	Rp 9,506,200,000	Program Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Banten	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	3	Rp 15,180,570,000	
	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Provinsi Banten	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	274.60	Rp 47,413,129,000	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Provinsi Banten	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	98.33	Rp75,589,470,000	
	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Provinsi Banten	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)	86.34	Rp 66,938,371,000	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Provinsi Banten	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)	33.33	Rp41,181,680,000	
	Program Keciaptakarya	Provinsi Banten	Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %)	81.24	Rp 42,177,322,000	Program Keciaptakarya	Provinsi Banten	Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %)	81.24	Rp15,650,000,000	
	Program Keciaptakarya	Provinsi Banten	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %)	79.19	Rp 11,356,003,000	Program Keciaptakarya	Provinsi Banten	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %)	79.19	Rp5,350,000,000	
	Program Keciaptakarya	Provinsi Banten	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %)	20.00	0,00	Program Keciaptakarya	Provinsi Banten	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %)	20.00	Rp11,000,000,000	
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Provinsi Banten	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	75.00	Rp 27,931,095,000	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Provinsi Banten	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	75.00	Rp664,600,000,000	
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Provinsi Banten	Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	83.00	Rp 7,548,147,000	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Provinsi Banten	Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	83.00	Rp66,000,000,000	

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan telaahan sebagai berikut:

- Presentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (%)
Target RKPD sebesar 86,34 % penanganan, sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar 33,33 %. Hal ini terjadi karena setelah dianalisa terdapat prioritas penanganan yang dilaksanakan.
- Indikator kinerja yang lainnya Target RKPD masih sama dengan Hasil Analisis Kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program kegiatan Tahun 2020 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berasal dari usulan sewaktu Forum SKPD Tahun 2019 maupun usulan langsung melalui surat permohonan.

Setelah mengalami review dan analisa, maka dapat digambarkan usulan-usulan tersebut dalam tabel sebagai berikut:

- a. Usulan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah Provinsi Banten
- b. Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Tahun 2019 Untuk Kab/
Kota



No.	Kegiatan		Pekerjaan	Vol.	Estimasi Biaya	Keterangan
1	Pengelolaan gedung strategis Provinsi	1	Pemb. Rumah Dinas Pimpinan	1 gedung	Rp.20 Milyar	Perlu arahan lokasi dan penetapan pada lahan aset pemerintah provinsi
		2	Pembangunan PUSKESMAS	1 gedung	Rp.4-5 Milyar	Perlu surat persetujuan/ permohonan Kab. Lebak
		3	Pembangunan Gedung BPKP Perwakilan Provinsi Banten	1 gedung	Rp.50 Milyar	Perlu penetapan lokasi mekanisme belanja modal yang dihibahkan
		4	Pembangunan Gedung SarPras Lainnya di Kejati Banten	1 gedung	Rp.50 Milyar	Mekanisme hibah instansi vertikal
2	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	1	Pembangunan TPST Bojong Menteng	1 paket	Rp.30 Milyar	Perlu surat persetujuan/ permohonan Kab. Serang
	TOTAL					

Tabel 2.4 Daftar Usulan Kegiatan FOPD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Program Kegiatan Provinsi Banten Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional;
- Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat;
- Pembangunan TPST Regional;
- Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis provinsi;
- Penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh.

Dan Program Kegiatan Provinsi Banten Tahun 2020 memiliki Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

- Pembangunan Sport Centre (Multiyears);
- Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat;
- Enataan Kawasan Kesultanan Banten;
- Pembangunan TPST Regional;
- Penataan Kawasan Kumuh;
- Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)

Tema Pembangunan dan Isu Strategis Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Tema Pembangunan Tahun 2020

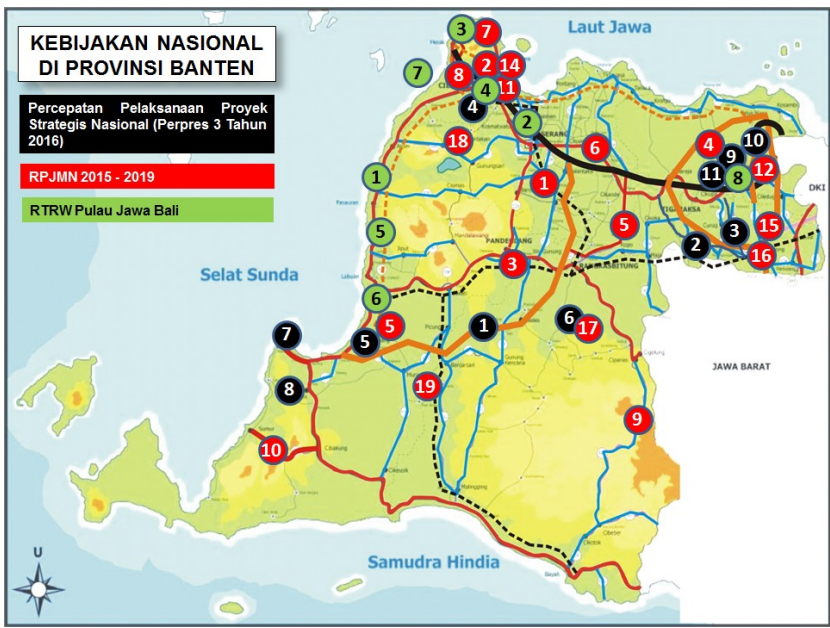


Gambar 3.2 Isu Strategis Tahun 2020

Disamping itu, terdapat isu strategis dan permasalahan pembangunan banten ditinjau dari sisi:

- a. Kesenjangan wilayah (IPM, Infrastruktur, pendapatan) sebagai berikut:
 1. Ketimpangan Aksesibilitas Kesehatan antara WKP I, II dan III
 2. Ketimpangan Daya Beli Masyarakat antara WKP I, II dan III
 3. Kurangnya Infrastruktur Ekonomi Masyarakat (Sesuai Potensi Ekonomi Wilayah)
 4. Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan antara WKP I, II dan III
 5. Ketimpangan Kemandirian Fiskal Antar Daerah dan Wilayah
 6. Kurangnya Konektivitas Infrastruktur Kewilayahan dan Antar Wilayah
- b. Kesenjangan Daya Saing (SDA dan SDM)
 1. Ketimpangan Pemanfaatan SDA Akibat Lemahnya Kualitas SDM
 2. Ketimpangan Investasi Antar Wilayah
 3. Kurangnya Daya Dukung Infrastruktur dalam Meningkatkan Investasi
- c. Kemiskinan dan Pengangguran
 1. Tingginya Migrasi Penduduk Antar Daerah di Provinsi Banten dan Dari Luar Provinsi Banten
 2. Rendahnya Kepemilikan Aset Dalam Memenuhi Kebutuhan
 3. Masih Tingginya Desa Tertinggal di Wilayah Provinsi Banten
- d. Tata Kelola Pemerintahan
 1. Belum optimalnya Sistem Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
 2. Belum optimalnya Integritas dan Kompetensi Aparatur
 3. Belum Optimalnya Tertib Pengelolaan Anggaran

4. Belum Optimalnya Konsolidasi Demokrasi



Perpres 3 Tahun 2016	RPJMN 2015 - 2019	RTRW Pulau Jawa Bali
1. Tol Serang – Panimbang 2. Tol Serpong – Balaraja 3. Tol Kunciran – Serpong 4. Pembangunan Terminal LPG Banten 5. Bandara Banten Selatan 6. Pembangunan Bendung Karian 7. KEK Tanjung Lesung 8. Percepatan Infrastruktur Transportasi, Listrik, Air Bersih, Untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung. 9. Kereta Api Ekspres Soekarno Hatta – Sudirman 10. Pengembangan Bandara Soekarno-Hatta 11. Energi Asal Sampah Kota-kota Besar (Tangerang)	1. Pembangunan jalur ganda KA dan elektrifikasi antara Maja – Rangkasbitung – MerakTol Serpong – Balaraja 2. Pembangunan jalur KA antara Tonjong – Pelabuhan Bojonegara 3. Reaktivasi jalur KA antara Rangkasbitung – Labuan 4. Pembangunan Terminal 3 dan pengembangan Bandara Soekarno-Hatta 5. Pembangunan Bandara Banten Selatan 6. Pembangunan Jalan Cikande – Rangkasbitung 7. Pembangunan Jalan Cikande – Serang – Cilegon 8. Pembangunan Jalan Cilegon – Bojonegara – Merak 9. Pembangunan Jalan Cilegon-Pasauran 10. Pembangunan Jalan Cipanas-Warung Banten – Bayah 11. Pembangunan Jalan Tanjung Lesung - Sumur 12. Pembangunan Jalan Serang – Bojonegara – Merak 13. Pembangunan Jalan Tol Cengkareng – Kunciran 14. Pembangunan Jalan Tol Cilegon – Bojonegara 15. Pembangunan Jalan Tol Kunciran - Serpong 16. Pembangunan Jalan Tol Serpong-Cinere	1. Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa (Cilegon - Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung-CipanasJaringan 2. Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa (Merak - Cilegon – Serang - Tangerang) 3. Jaringan Jalan Merak - Bojonegara – Cilegon 4. Pemantapan jaringan jalan bebas hambatan antar kota di Pulau Jawa (Tangerang - Merak), dan (Cilegon -Bojonegara) 5. Pemantapan jaringan jalur kereta api lintas utara - selatan (pengumpulan) Pulau Jawa pada lintas Merak – Cilegon – Serang - Rangkas Bitung - Jakarta; Labuan – Pandeglang - Rangkas Bitung; Anyer – Kidul - Cilegon; 6. Pengembangan jaringan jalur kereta api lintas utara - selatan (pengumpulan) Pulau Jawa pada lintas Anyer Kidul – Labuan - Panimbang; Cilegon - Bojonegara 7. Pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antar wilayah / antar pulau (Merak - Bakauheni); Merak - Panjang; Merak - Srengsem; Ciwandan – Srengsem 8. pemantapan fungsi Bandar Udara Soekarno-Hatta sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer

Gambar 3.3 Kebijakan Nasional di Provinsi Banten

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dengan memperhatikan amanat RPJPD Provinsi Banten 2005-2025, serta mempertimbangkan aspek potensi/kondisi aktual, dan permasalahan yang dihadapi, maka Pembangunan infrastruktur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten diselenggarakan dengan berpedoman pada Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah:

“Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlaqul Karimah”

Sedangkan, untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur.
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas.
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas.
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Memperhatikan Visi dan misi tersebut dan perubahan paradigma serta kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Banten dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional, maupun global.

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten terkait dengan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017–2022 antara lain terkait misi 1 dan misi 2 sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur.

a. *Misi Terkait (Misi Pertama),*

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yang memiliki prioritas unggulan sebagai berikut:

- 1) Penerapan E-Planning, E-monev, dan E-Budgeting;
- 2) Reformasi Birokrasi;
- 3) Penerapan Manajemen Kinerja (Peningkatan Predikat LAKIP dari CC ke BB);
- 4) Reformasi Tata Kelola Keuangan (Peningkatan predikat dari Disclaimer / WDP ke WTP);
- 5) Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik;
- 6) Perbaikan Angka Indeks Persepsi Korupsi;
- 7) Perbaikan Hubungan Kerja Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

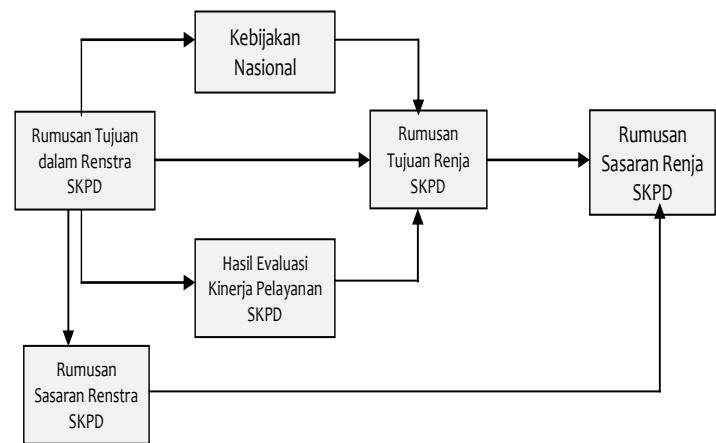
b) *Misi Terkait (Misi Kedua),*

Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur, yang memiliki prioritas unggulan bidang perumahan, kawasan permukiman dan Ke-Cipta Karya-an sebagai berikut:

- 1) Revitalisasi Kawasan Banten Lama dalam Rangka Pengembangan Sektor Pariwisata dan Pelestarian Cagar Budaya serta Kearifan Lokal;
- 2) Penataan Kawasan Kumuh Kampung Nelayan, Perdesaan/Perkotaan;

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten pada tahun 2019, dimana infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD PROVINSI



Gambar 3.5 Bagan Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja OPD Provinsi

Sebagai penjabaran atas visi yang terkait Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, maka tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur bidang perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan iman dan taqwa guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat.

2. Meningkatnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan kumuh, kawasan strategis, kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana.

Kemudian agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi maka diperlukan upaya-upaya dalam internal proses yang harus dilakukan dengan baik, sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam periode 2017-2022 antara lain:

1. Meningkatnya Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja;
2. Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang layak;
3. Tercapainya Sarana dan prasarana gedung Strategis Provinsi yang berkualitas;

3.3 Program dan Kegiatan

Dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran kinerja Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten dan harapan kinerja Tahun 2020 dengan memperhatikan pencapaian misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM), sehingga prioritas penanganan Tahun 2020 sesuai dengan RKPD, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten melaksanakan program kegiatan dengan gambaran umum sebagai berikut:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
Terdiri dari 4 program dan 22 kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
Sebagian besar program kegiatan tersebar di seluruh provinsi Banten
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya adalah sebesar **Rp. 794.438.887.000,00** (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2020 berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerjanya antara lain sebagai berikut:



PROGRAM DAN KEGIATAN			RENCANA PAGU ANGGARAN TA. 2020 (Rp)
			KUA PPAS
URUSAN WAJIB			
I	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan		174.571.263.300
	1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	82.450.000.000
	2	Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	10.589.470.000
	3	Penatagunaan Kawasan Permukiman	1.850.000.000
	4	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	6.004.793.300
	5	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	55.350.000.000
	6	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	3.930.000.000
	7	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	14.400.000.000
II	Program Keciaptakarya		81.278.315.000
	8	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	18.800.000.000
	9	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	5.950.000.000
	10	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	2.000.000.000
	11	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	38.211.187.000
	12	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakarya	16.317.128.000
III	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan		522.510.600.000
	13	Pengelolaan gedung strategis Provinsi	35.450.000.000
	14	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	460.720.000.000
	15	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	23.300.000.000
	16	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	3.040.600.000
IV	Program Tata Kelola Pemerintahan		16.075.708.700
	17	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	350.000.000



18	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.400.000.000
19	Penyediaan Barang dan Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	12.525.708.700
20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	1.200.000.000
21	Peningkatan Kapasitas Aparatur	400.000.000
22	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	200.000.000
TOTAL ANGGARAN TA 2020		794.438.887.000

Adapun detail rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2020 disajikan dalam lampiran.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	P	B/L/R	INDIKATOR KINERJA			SUMBER ANGGARAN			KETERANGAN
				OUTPUT		APBD Prov				
						USULAN	VERIFIKASI	SELISIH		
1	2	3	4	5		8	8		11	
I	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan									
	Peningkatan Kualitas 1 Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh				98.33	Ha	119,830,000,000	103,830,000,000	- 16,000,000,000	
				1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Banten	98.33	Ha	119,830,000,000	103,830,000,000	- 16,000,000,000	
				1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	14.66	Ha	14,660,000,000	14,660,000,000	-	
				2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	12.00	Ha	12,000,000,000	12,000,000,000	-	
				3 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Kalanganyar Kec. Labuan Kab. Pandeglang	12.00	Ha	12,000,000,000	12,000,000,000	-	
				4 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Rancasenang Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	14.00	Ha	14,000,000,000	14,000,000,000	-	
				5 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Terondol Kec. Serang Kota Serang	13.59	Ha	13,590,000,000	13,590,000,000	-	
				6 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Tnjung Anom Kec. Msuk Kab. Tangerang	6.30	Ha	6,300,000,000	6,300,000,000	-	
				7 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Pamulang Timur Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan	12.00	Ha	12,000,000,000	12,000,000,000	-	
				8 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Larangan Utara Kec. Larangan Kota Tangerang	13.78	Ha	13,780,000,000	13,780,000,000	-	
				9 Pembangunan Kampung KB Tulip Desa Pasing Angin Kecamatan Cikarai Kabupaten Cilegon	200.00	Paket	2,000,000,000	2,000,000,000	-	Usulan BKKBN Provinsi Banten
				10 Pembangunan Kampung KB Kelurahan Gandasari RW 06 Kecamatan Jati Uwung Kota Tangerang		Paket	2,000,000,000	- 2,000,000,000		Usulan BKKBN Provinsi Banten

NO	PROGRAM / KEGIATAN	P	B/L/R	INDIKATOR KINERJA	SUMBER ANGGARAN					KETERANGAN
					OUTPUT	APBD Prov				
				11 Pembangunan Kampung KB Jagarayu Desa Gelam Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang		Paket	2,000,000,000		- 2,000,000,000	Usulan BKKBN Provinsi Banten
				12 Pembangunan Kampung KB Tarahan Desa Sukasari Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang		Paket	2,000,000,000		- 2,000,000,000	Usulan BKKBN Provinsi Banten
				13 Pembangunan Sarana Prasarana Dukungan Kawasan Pengentasan Stunting, (Cilangkahan Kec. Malimping dan Cisimeut Kec. Leuwidamar Kab. Lebak ;Bayumundu Kec. Kaduhejo , Kadumaneuh Kab. Banjar Kab. Pandeglang)	1.00	Desa	10,000,000,000	2,500,000,000	- 7,500,000,000	Usulan DinKes Provinsi Banten
				14 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kota Serang	12.00	ruas	1,000,000,000	500,000,000	- 500,000,000	Usulan Dperkim Kota Serang
				15 Infrastruktur Kawasan Kumuh Kab. Lebak	1.00	lokasi	2,500,000,000	500,000,000	- 2,000,000,000	Usulan Dinas PERKIM Kab. Lebak
				16 PSU Permukiman Kota Serang	44.00	ruas			-	
				16 PSU Kawasan Permukiman Kab. Lebak	11.00	lokasi			-	Usulan Dinas PERKIM Kab. Lebak
				17 Jalan Poros desa	51.00	lokasi			-	Usulan Dinas PERKIM Kab. Pandeglang
	2 Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman				11.00	dok	10,960,000,000	9,320,000,000	- 1,640,000,000	
				1. Perencanaan Teknis bidang kawasan permukiman	11.00	dok	6,500,000,000	5,500,000,000	- 1,000,000,000	
				1 DED Penangan Kawasan Kumuh di Kab. Pandeglang	2.00	dok	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
				2 DED Penangan Kawasan Kumuh Kab. Serang	2.00	dok	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
				3 DED Penangan Kawasan Kumuh Kota Serang	2.00	dok	500,000,000	500,000,000	-	
				4 DED Penangan Kawasan Kumuh Kab. Tangerang	1.00	dok	500,000,000	500,000,000	-	
				5 DED Penangan Kawasan Kumuh Kota Tangerang Selatan	2.00	dok	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
				6 DED Penangan Kawasan Kumuh Kota Tangerang	2.00	dok	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
				7 Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	8.00	dok	1,500,000,000	500,000,000	- 1,000,000,000	
				2. Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	15.00	dok	4,460,000,000	3,820,000,000	- 640,000,000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	P	B/L/R	INDIKATOR KINERJA	SUMBER ANGGARAN					KETERANGAN
					OUTPUT		APBD Prov			
				Pengawasan Teknis Peningakatan Kualitan 1 Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Muara Ciujung Barat Kec, Rangkasbitung Kab. Lebak	1.00	dok	450,000,000	450,000,000	-	
				Pengawasan Teknis Peningakatan Kualitan 2 Kawasan Permukiman Kumuh Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	1.00	dok	450,000,000	450,000,000	-	
				Pengawasan Teknis Peningakatan Kualitan 3 Kawasan Permukiman Kumuh Desa Karanganyar Kec. Labuan Kab. Pandeglang	1.00	dok	450,000,000	450,000,000	-	
				Pengawasan Teknis Peningakatan Kualitan 4 Kawasan Permukiman Kumuh Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	1.00	dok	450,000,000	450,000,000	-	
				Pengawasan Teknis Peningakatan Kualitan 5 Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Trondol Kec. Serang Kota Serang	1.00	dok	450,000,000	450,000,000	-	
				Pengawasan Teknis Peningakatan Kualitan 6 Kawasan Permukiman Kumuh Desa Tanjunganom Kec. Mauk Kab. Tangerang	1.00	dok	450,000,000	450,000,000	-	Diusulkan di SIMLARAS
				Pengawasan Teknis Peningakatan Kualitan 7 Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Pamulang Timur Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan	1.00	dok	450,000,000	450,000,000	-	
				Pengawasan Teknis Peningakatan Kualitan 8 Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Larangan Utara Kec. Larangan Kota Tangerang	1.00	dok	450,000,000	450,000,000	-	Diusulkan di SIMLARAS
				9 Pembangunan Kampung KB Tulip Desa Pasing Angin Kecamatan Cikarai Kabupaten Cilegon	1.00	dok	80,000,000	80,000,000	-	
				Pembangunan Kampung KB Kelurahan Gandasari RW 06 Kecamatan Jati Uwung Kota Tangerang	1.00	dok	80,000,000	-	-	80,000,000
				11 Pembangunan Kampung KB Jagarayu Desa Gelam Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang	1.00	dok	80,000,000	-	-	80,000,000
				Pembangunan Kampung KB Tarahan Desa Sukasari Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang	1.00	dok	80,000,000	-	-	80,000,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	P	B/L/R	INDIKATOR KINERJA	SUMBER ANGGARAN					KETERANGAN	
						APBD Prov					
				13 Pembangunan Sarana Prasarana Dukungan Kawasan Pengentasan Stunting, (Cilangkahan Kec. Malimping dan Cisimeut Kec. Leuwidamar Kab. Lebak ;Bayumundu Kec. Kaduhejo , Kadumaneuh Kab. Banjar Kab. Pandeglang)	1.00	dok	400,000,000	100,000,000	-	300,000,000	
				14 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kota Serang	1.00	dok	40,000,000	20,000,000	-	20,000,000	
				15 Infrastruktur Kawasan Kumuh Kab. Lebak	1.00	dok	100,000,000	20,000,000	-	80,000,000	
	33 Penatagunaan Kawasan Permukiman				20.00	%	2,900,000,000	2,400,000,000	-	500,000,000	
				1. Penatagunaan Kawasan Permukiman	20.00	%	2,900,000,000	2,400,000,000	-	500,000,000	
				1 Pembinaan Peningkatan Kawasan Permukiman di Provinsi Banten	2.00	keg	500,000,000	500,000,000		-	
				2 Rapat Koordinasi Bidang Kawasan Permukiman	11.00	keg	300,000,000	300,000,000		-	
				3 Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	8.00	keg	600,000,000	600,000,000		-	
				4 Penataan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten	1.00	Paket	1,500,000,000	1,000,000,000	-	500,000,000	
	4 Penyediaan dan Pembangunan Perumahan				450.00	Unit	57,750,000,000	52,250,000,000	-	5,500,000,000	
				1 Pembangunan Perumahan	50.00	Unit	3,000,000,000	3,000,000,000		-	
				1 Pembangunan Perumahan	50.00	Unit	3,000,000,000	3,000,000,000		-	
				2 Pembangunan Rumah Susun UIN Provinsi Banten	128.00	Unit					Diusulkan di SIMLARAS
				3 Revitalisasi Tower I Rusunawa Serua	1.00	Unit					Usulan Dinas PERKIM Kota TangSel
				4 Revitalisasi Rumah Sosial Kademangan	1.00	Unit					Usulan Dinas PERKIM Kota TangSel
				2 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	400.00	Unit	34,750,000,000	29,250,000,000	-	5,500,000,000	
				1 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	400.00	Unit	29,250,000,000	29,250,000,000		-	
				2 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Serang		Unit	3,000,000,000		-	3,000,000,000	Usulan Dinas PERKIM Kota Serang; Provinsi: (Kel. Bendung Kec. Kasemen, Kel. Sukajaya Kec. Curug)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	P	B/L/R	INDIKATOR KINERJA			SUMBER ANGGARAN			KETERANGAN
						OUTPUT	APBD Prov			
				3 Bantuan RTLH Kota Cilegon		Unit	2,500,000,000		- 2,500,000,000	Usulan Dinas PERKIM Kota Cilegon
				4 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Serang	60.00	Unit				Usulan Dinas PERKIM Kota Serang
				5 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kab. Lebak	3,913.00	Unit				Usulan Dinas PERKIM Kab. Lebak
				6 Bantuan RTLH Kota Cilegon	450.00	Unit				Usulan Dinas PERKIM Kota Cilegon
				3 Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman	100.00	Paket	20,000,000,000	20,000,000,000	-	
				1 Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman	100.00	Paket	20,000,000,000	20,000,000,000	-	
				2 Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Kota Serang	6.00	lokasi				Usulan Dinas PERKIM Kota Serang
				3 PSU Perumahan Bukit Cilegon Asri	1.00	lokasi				Usulan Dinas PERKIM Kota Cilegon
	Perencanaan dan 5 Pengawasan Teknis Perumahan				27	dok	6,987,500,000	5,212,500,000	- 1,775,000,000	
				1. PerencanaanTeknis Perumahan	7.00	dok	2,100,000,000	2,100,000,000	-	
				1 Pendataan Rumah terkena bencana provinsi	1.00	dok	150,000,000	150,000,000	-	
				Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi	1.00	dok	300,000,000	300,000,000	-	
				3 DED Rumah Khusus pada Kawasan Strategis Perbatasan Kab/ kota	1.00	dok	300,000,000	300,000,000	-	
				4 DED Penyediaan Rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi	1.00	dok	300,000,000	300,000,000	-	
				5 SID Prototype Pembangunan Rumah Apung bagi Korba Banjir	1.00	dok	300,000,000	300,000,000	-	
				6 Updating SPM Perumahan	1.00	dok	100,000,000	100,000,000	-	
				7 Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pengawasan Perumahan	4.00	keg	400,000,000	400,000,000	-	
				8 Kajian UPT Perumahan	1.00	dok	250,000,000	250,000,000	-	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	P	B/L/R	INDIKATOR KINERJA	SUMBER ANGGARAN					KETERANGAN
					OUTPUT	APBD Prov				
				2. Pengawasan Teknis Perumahan	20.00	dok	4,887,500,000	3,112,500,000	- 1,775,000,000	
				1 Pengawasan Pembangunan Perumahan	5.00	dok	150,000,000	150,000,000	-	
				2 Pengawasan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	8.00	dok	1,737,500,000	1,462,500,000	- 275,000,000	
				3 Pengawasan Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman	6.00	dok	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
				4 Fasilitasi Tenaga Pendamping Peningkatan Kualitas RTLH	1.00	dok	2,000,000,000	500,000,000	- 1,500,000,000	
	6 Penatagunaan Pengembangan Perumahan				20.00	%	1,430,000,000	1,430,000,000	-	
				1. Penatagunaan Pengembangan Perumahan	20.00	%	1,430,000,000	1,430,000,000	-	
				1 Pendampingan pelaksanaan POKJA PKP Provinsi Banten	1.00	keg				
				2 Relokasi Bangunan di Kawasan Inti Banten Lama	1.00	keg				
				3 Pembinaan Perumahan Sehat dan Layak Huni	1.00	keg				
				4 Pendataan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan di Provinsi Banten	1.00	keg				
	7 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan				50,000.00	M2	35,000,000,000	35,000,000,000	-	
				1. Pengadaan Lahan	50,000.00	M2	35,000,000,000	35,000,000,000	-	
				1 Pengadaan Lahan Perumahan	50,000.00	M2	35,000,000,000	35,000,000,000	-	
II	PROGRAM KECIPTAKARYAAN									
	8 Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih				5.00	lokasi	80,950,000,000	77,950,000,000	- 3,000,000,000	
				1. Pembangunan Infrastrktur SPAM Lintas Daerah	1.00	lokasi	65,000,000,000	65,000,000,000	-	
				1 Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi WTP Sindangheula	1.00	lokasi	65,000,000,000	65,000,000,000	-	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	P	B/L/R	INDIKATOR KINERJA	SUMBER ANGGARAN					KETERANGAN
					OUTPUT	APBD Prov				
				2. Pembangunan Infrastrktur SPAM di Kawasan Strategis	4.00	lokasi	15,600,000,000	12,600,000,000	- 3,000,000,000	
				1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Sawarna	1.00	lokasi	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
				2 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kawasan Strategis Provinsi (pantai selatan terpadu)	1.00	lokasi	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
				3 Pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan	1.00	lokasi	3,600,000,000	3,600,000,000	-	
				4 Pemasangan Pipa Transmisi dan Distribusi Air Bersih IKK (Ibu Kota Kecamatan Maja, Rangkas))	1.00	lokasi	10,000,000,000	7,000,000,000	- 3,000,000,000	
				5 Pembangunan Spam Rangkasbitung-Maja	1.00	lokasi				
				6 Pembangunan Spam pangarangan - bayah	1.00	lokasi				
				7 Sarana Prasarana Air Bersih Kota Serang	15.00	lokasi				
				8 Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Lebak	20.00	lokasi				Usulan Dinas PERKIM Kab. Lebak
				9 Sarana Air Bersih / Air Minum (AMPL) Kab. Pandeglang	24.00	lokasi				Usulan Dinas PERKIM Kab. Pandeglang
				3 Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Air Minum	1.00	keg	350,000,000	350,000,000	-	
				1. Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Air Minum	1.00	keg	350,000,000	350,000,000	-	
	9 Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi				4.00	lokasi	24,300,000,000	24,300,000,000	-	
				1. Pembangunan Infrastruktur Sanitasi di Kawasan Strategis	4.00	lokasi	23,700,000,000	23,700,000,000	-	
				1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Strategis	1.00	lokasi	17,500,000,000	17,500,000,000	-	
				2 Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Sawarna	1.00	lokasi	2,000,000,000	2,000,000,000	-	
				3 Pembangunan IPAL Komunal	1.00	lokasi	3,200,000,000	3,200,000,000	-	
				4 Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Kawasan Strategis Provinsi (pantai selatan terpadu)	1.00	lokasi	1,000,000,000	1,000,000,000	-	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	P	B/L/R	INDIKATOR KINERJA	SUMBER ANGGARAN						KETERANGAN
					OUTPUT		APBD Prov				
				5 Pembangunan Drainase Perkotaan Rangkasbitung	1.00	lokasi				Usulan DPUPR Kab. Lebak	
				5 Rehabilitasi IPLT Degung Kab lebak	1.00	lokasi					
				5 Sarana Prasarana Sanitasi Kota Serang	8.00	lokasi					
				5 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPLD) Kab. Pandeglang	13.00	lokasi				Usulan Dinas PERKIM Kab. Pandeglang	
				5 IPLT Lintas Kab/ kota Bojong Menteng	1.00	lokasi					
			2.	Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan	3.00	keg	600,000,000	600,000,000	-		
				1. Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pengembangan Sanitasi Lingkungan	1.00	keg	150,000,000	150,000,000	-		
				2. Sosialisasi Kegiatan Penyediaan Sanitasi	1.00	keg	250,000,000	250,000,000	-		
				3. Updating Database Sanitasi	1.00	keg	200,000,000	200,000,000	-		
	Pengelolaan dan 10 Pengembangan Persampahan				2.00	lokasi	20,950,000,000	20,950,000,000	-		
				1. Pembangunan Infrastruktur Persampahan Regional	1.00	lokasi	19,950,000,000	19,950,000,000	-		
				1. Pembangunan TPST Bojong Menteng Tahap 2	1.00	lokasi	19,950,000,000	19,950,000,000	-		
				2 Pembangunan Infrastrktur Persampahan di Kawasan Strategis	1.00	lokasi	1,000,000,000	1,000,000,000	-		
				Pembangunan Sarana Prasarana Persampahan 1 Kawasan Strategis Provinsi (pantai selatan terpadu)	1.00	lokasi	1,000,000,000	1,000,000,000	-		
				2 Pembangunan TPA Cigeulis Kab. Pandeglang (Pembangunan Ulang)	1.00	lokasi				Diusulkan di SIMLARAS	
	Perencanaan dan 11 Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman				9.00	dok	44,479,000,000	18,963,500,000	- 25,515,500,000		
				1. Perencanaan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya-an	9.00	dok	2,900,000,000	1,700,000,000	- 1,200,000,000		

NO	PROGRAM / KEGIATAN	P	B/L/R	INDIKATOR KINERJA	SUMBER ANGGARAN					KETERANGAN
					OUTPUT		APBD Prov			
				1 Updating Master Plan KP3B	1.00	dok	100,000,000	100,000,000	-	
				2 DED Gd. Wanita	1.00	dok	250,000,000	200,000,000	- 50,000,000	
				3 DED Gedung SAMSAT	1.00	dok	250,000,000	200,000,000	- 50,000,000	
				4 DED Depo Arsip	1.00	dok	250,000,000	200,000,000	- 50,000,000	
				5 DED Landmark Kawasan Strategis	2.00	dok	500,000,000	400,000,000	- 100,000,000	
				6 DED Intake WTP Sindangheula	1.00	dok	250,000,000	200,000,000	- 50,000,000	
				7 Capaian SPM PUPR	1.00	dok	250,000,000	200,000,000	- 50,000,000	
				8 Kajian UPT Air Minum	1.00	dok	250,000,000	200,000,000	- 50,000,000	
				9 Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Strategis Provinsi		dok	800,000,000		- 800,000,000	
				10 SID/DED Perencanaan WTP Dan Jaringan Pipa Distribusi Hilir Cidurian		dok				
				2. Pembinaan Perencanaan Teknis Ke-Ciptakarya-an	20.00	%	275,000,000	275,000,000	-	
				1 Pelatihan Perencanaan Infrastruktur KeCiptaKarya-an	1.00	keg	150,000,000	150,000,000	-	
				2 Kompilasi Data Perencanaan Infrastruktur Permukiman	1.00	dok	25,000,000	25,000,000	-	
				3 Diseminasi tentang Bangunan Gedung	1.00	keg	100,000,000	100,000,000	-	
				3. Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya-an	27.00	dok	40,734,000,000	16,418,500,000	- 24,315,500,000	
				1 Pengawasan Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi WTP Sindangheula	1.00	dok	2,600,000,000	1,950,000,000	- 650,000,000	
				2 Pengawasan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Sawarna	1.00	dok	40,000,000	30,000,000	- 10,000,000	
				3 Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kawasan Strategis Provinsi (pantai selatan terpadu)	1.00	dok	40,000,000	30,000,000	- 10,000,000	
				4 Pengawasan Pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan	1.00	dok	144,000,000	108,000,000	- 36,000,000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	P	B/L/R	INDIKATOR KINERJA	SUMBER ANGGARAN					KETERANGAN
				OUTPUT		APBD Prov				
				5 Pengawasan Pemasangan Pipa Transmisi dan Distribusi Air Bersih IKK (Ibu Kota Kecamatan Maja, Sajira, Rangkas))	1.00	dok	400,000,000	210,000,000	- 190,000,000	
				6 Pengawasan Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Strategis	1.00	dok	700,000,000	525,000,000	- 175,000,000	
				7 Pengawasan Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Sawarna	1.00	dok	80,000,000	60,000,000	- 20,000,000	
				8 Pengawasan Pembangunan IPAL Komunal	1.00	dok	128,000,000	96,000,000	- 32,000,000	
				9 Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Kawasan Strategis Provinsi (pantai selatan terpadu)	1.00	dok	40,000,000	30,000,000	- 10,000,000	
				10 Pengawasan Pembangunan TPST Bojong Menteng Tahap 2	1.00	dok	798,000,000	598,500,000	- 199,500,000	
				11 Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Persampahan Kawasan Strategis Provinsi (pantai selatan terpadu)	1.00	dok	40,000,000	30,000,000	- 10,000,000	
				12 Pengawasan Pembangunan Gedung OPD berikut pekerjaan Non Standar lainnya	1.00	dok	880,000,000	660,000,000	- 220,000,000	
				13 Pengawasan Pembangunan Gedung InDag	1.00	dok	2,000,000,000	1,000,000,000	- 1,000,000,000	
				14 Pengawasan Pembangunan Gedung SarPras Lainnya di Kejati Banten	1.00	dok	600,000,000	450,000,000	- 150,000,000	
				15 Pengawasan Lanscape Gedung 6 OPD	1.00	dok	320,000,000	240,000,000	- 80,000,000	
				16 Pengawasan Penataan Tugu Batas (Cipanas, Ciputat)	1.00	dok	16,000,000	16,000,000	-	
				17 Pengawasan Penataan Cikadueun (Syech Mansur)	1.00	dok	800,000,000	330,000,000	- 470,000,000	
				18 Pengawasan Penataan Caringin (Syech Asnawi)	1.00	dok	800,000,000	330,000,000	- 470,000,000	
				19 Pengawasan Pembangunan Kawasan Ciputri Banten Lama (Baitul Qur'an)	1.00	dok	2,400,000,000	1,500,000,000	- 900,000,000	
				20 Pengawasan Pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre (Multiyears, Desain n build)	1.00	dok	24,760,000,000	7,800,000,000	- 16,960,000,000	
				21 Pengawasan Penataan Landmark Kawasan Strategis	1.00	dok	80,000,000	80,000,000	-	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	P	B/L/R	INDIKATOR KINERJA	SUMBER ANGGARAN					KETERANGAN
					OUTPUT		APBD Prov			
				22 Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Strategis Sawarna	1.00	dok	1,200,000,000	150,000,000	- 1,050,000,000	
				23 Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Strategis Provinsi (Pantai selatan Terpadu)	1.00	dok	200,000,000	150,000,000	- 50,000,000	
				24 Sarana Prasarana Pengembangan Wisata Gn. Pinang	1.00	dok	60,000,000	45,000,000	- 15,000,000	
				25 Sarana Prasarana Pengembangan Wisata Cihunjuran	1.00	dok	60,000,000	- -	60,000,000	
				26 Pembangunan Air Mancur Balong Ranca Leuntah Rangkasbitung	1.00	dok	1,400,000,000	- -	1,400,000,000	
				27 Penataan lingkungan dan publik utility alun alun kec. Cibaliung Kab. Pandeglang	1.00	dok	148,000,000	- -	148,000,000	
				4. Pembinaan Pengawasan Teknis Ke-Ciptakarya-an	20.00	%	225,000,000	225,000,000	-	
				1 Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Sanitasi & Air Bersih Bidang Infrastruktur Permukiman	1.00	keg	200,000,000	200,000,000	-	
				2 Kompilasi Data Pengawasan Infrastruktur Permukiman	1.00	dok	25,000,000	25,000,000	-	
				5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Permukiman	20.00	%	345,000,000	345,000,000	-	
				1. Pelatihan Manajemen Quality Control Perencanaan Dan Pengawasan Infrastruktur Permukiman	1.00	keg	150,000,000	150,000,000	-	
				2. Penyusunan Profil Teknis Perencanaan & Pengawasan Infrastruktur Permukiman	1.00	keg	30,000,000	30,000,000	-	
				3. Bimbingan Teknik Updating AHSP Bidang Cipta Karya	1.00	keg	150,000,000	150,000,000	-	
				4. Penyusunan Laporaan Kinerja Kegiatan	1.00	keg	15,000,000	15,000,000	-	
	12 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan				14,000.00	m2	12,400,000,000	12,400,000,000	-	
				1. Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan	14,000.00	m2	12,400,000,000	12,400,000,000	-	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	P	B/L/R	INDIKATOR KINERJA		SUMBER ANGGARAN				KETERANGAN	
						OUTPUT		APBD Prov			
				1	Pembebasan Lahan WTP Dan Jaringan Pipa Distribusi Hilir Ciujung	2,000.00	m2	2,000,000,000	2,000,000,000	-	
				2	Pembebasan Lahan Intake WTP Sindang Heula	2,000.00	m2	1,400,000,000	1,400,000,000	-	
				3	Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B	10,000.00	m2	9,000,000,000	9,000,000,000	-	
III	PROGRAM PENTAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN										
	13	Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi				2.00	Gedung	95,800,000,000	95,800,000,000	-	
				1.	Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi	2.00	Gedung	95,400,000,000	95,400,000,000	-	
				1	Pembangunan Gedung OPD berikut pekerjaan Non Standar lainnya	1.00	Gedung	22,000,000,000	22,000,000,000	-	
				2	Pembangunan Gedung InDag	1.00	Gedung	50,000,000,000	50,000,000,000	-	
				3	Pembangunan Gedung SarPras Lainnya di Kejati Banten	1.00	Gedung	15,000,000,000	15,000,000,000	-	
				4	Lanscape Gedung 6 OPD	6.00	Gedung	8,000,000,000	8,000,000,000	-	
				5	Penataan Tugu Batas (Cipanas, Ciputat)	2.00	Unit	400,000,000	400,000,000	-	
				2.	Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1.00	keg	400,000,000	400,000,000	-	
				1.	Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1.00	keg	400,000,000	400,000,000	-	
	14	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi				7.63	kawasan	797,800,000,000	704,600,000,000	- 93,200,000,000	
				1.	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	7.63	kawasan	797,700,000,000	704,500,000,000	- 93,200,000,000	
				1	Penataan Cikadueun (Syech Mansur)	1.00	kawasan	20,000,000,000	11,000,000,000	- 9,000,000,000	
				2	Penataan Caringin (Syech Asnawi)	1.00	kawasan	20,000,000,000	11,000,000,000	- 9,000,000,000	
				3	Pembangunan Kawasan Ciputri Banten Lama (Baitul Qur'an)	1.00	kawasan	60,000,000,000	50,000,000,000	- 10,000,000,000	
				4	Pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre (Multiyears, Desain n build)	0.63	kawasan	619,000,000,000	619,000,000,000	-	
				5	Penataan Landmark Kawasan Strategis	1.00	kawasan	2,000,000,000	2,000,000,000	-	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	P	B/L/R	INDIKATOR KINERJA	SUMBER ANGGARAN					KETERANGAN
					OUTPUT	APBD Prov				
				6 Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Strategis Sawarna	1.00	kawasan	30,000,000,000	5,000,000,000	- 25,000,000,000	Usulan DPUPR Kab. Lebak
				7 Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Strategis Provinsi (Pantai selatan Terpadu)	1.00	kawasan	5,000,000,000	5,000,000,000	-	
				8 Sarana Prasarana Pengembangan Wisata Gn. Pinang	1.00	kawasan	1,500,000,000	1,500,000,000	-	Usulan Dinas Pariwisata Prov Banten
				9 Sarana Prasarana Pengembangan Wisata Cihunjuran		kawasan	1,500,000,000		- 1,500,000,000	
				10 Pembangunan Air Mancur Balong Ranca Leuntah Rangkasbitung		kawasan	35,000,000,000		- 35,000,000,000	Usulan Dinas PUPR Kab. Lebak
				11 Penataan lingkungan dan publik utility alun alun kec. Cibaliung Kab. Pandeglang		lokasi	3,700,000,000		- 3,700,000,000	Usulan DPUPR Kab. Pandeglang
				12 Pembangunan Taman Stadion Ona (Belakang Kolam Renang)	1.00	kawasan				Usulan Dinas PUPR Kab. Lebak
				13 Pembangunan Hutan Kota Stadion Ona (Samping Padepokan Pencak Silat)	1.00	kawasan				Usulan Dinas PUPR Kab. Lebak
				Pembangunan PrasaranaWisata Baduy (Ikon, Parkir kendaraan, Toko Pedagang, Pusat informasi dll)	1.00	kawasan				Usulan Dinas PUPR Kab. Lebak
				15 Pembangunan Bumi perkemahan Pramuka pasir roko cimarga	1.00	kawasan				Usulan Dinas PUPR Kab. Lebak
				16 Pembangunan Alun Alun Rangkasbitung	1.00	kawasan				Usulan Dinas PUPR Kab. Lebak
				17 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Serang	2.00	unit				Usulan Dinas Dperkim Kota Serang
				2. Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1.00	keg	100,000,000	100,000,000	-	
				1. Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1.00	keg	100,000,000	100,000,000	-	
	15 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis				100.00	%	15,739,885,700	15,658,369,110	- 81,516,590	
				1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	100.00	%	15,739,885,700	15,658,369,110	- 81,516,590	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	P	B/L/R	INDIKATOR KINERJA	SUMBER ANGGARAN					KETERANGAN
					OUTPUT		APBD Prov			
				1 Pemeliharaan KP3B	1.00	keg	14,139,885,700	14,058,369,110	- 81,516,590	
				2 Pemeliharaan Banten Lama	1.00	keg	1,600,000,000	1,600,000,000	-	
	16 Penataan Sarana dan Prasarana Sarana Kawasan Strategis				1	keg	5,440,600,000	5,440,600,000	-	
				1 Penataan Sarana dan Prasarana Saran Strategis	1	keg	5,440,600,000	5,440,600,000	-	
	PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN									
	17 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset				22.00	dok	265,000,000	265,000,000	-	
				1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	17.00	dok	220,000,000	220,000,000	-	
				Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2.00	dok	30,000,000	30,000,000	-	
				3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3.00	dok	15,000,000	15,000,000	-	
	18 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan				34.00	dok	1,900,000,000	1,900,000,000	-	
				1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	3.00	dok	100,000,000	100,000,000	-	
				2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9.00	dok	800,000,000	800,000,000	-	
				3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	12.00	dok	100,000,000	100,000,000	-	
				4 Monitoring dan Evaluasi	4.00	dok	250,000,000	250,000,000	-	
				5 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	6.00	dok	650,000,000	650,000,000	-	
	19 Penyediaan Barang dan Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran				12.00	Bln	10,850,000,000	10,850,000,000	-	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	P	B/L/R	INDIKATOR KINERJA	SUMBER ANGGARAN					KETERANGAN
					OUTPUT		APBD Prov			
				1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	12.00	Bln	3,000,000,000	3,000,000,000	-	
				2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	12.00	Bln	4,000,000,000	4,000,000,000	-	
				3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12.00	Bln	3,500,000,000	3,500,000,000	-	
				4 Koordinasi an Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	12.00	Bln	350,000,000	350,000,000	-	
	20 Peningkatan Kapasitas Aparatur				12.00	Bln	200,000,000	200,000,000	-	
				1. Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	12.00	Bln	50,000,000	50,000,000	-	
				2. Peningkatan Kompetensi Aparatur	12.00	Bln	150,000,000	150,000,000	-	
	21 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan				12.00	bln	160,000,000	160,000,000	-	
				1. Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD	12.00	bln	85,000,000	85,000,000	-	
				2. Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD	12.00	bln	75,000,000	75,000,000	-	
	22 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis				12.00	bln	1,120,030,890	1,120,030,890	-	
				1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	12.00	bln	1,120,030,890	1,120,030,890	-	
	TOTAL						1,347,212,016,590	1,200,000,000,000	- 147,212,016,590	

KEPALA DINAS,


Ir. H. MOH. YANUAR, MP
NIP. 19610101 198802 1 001

**REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2020**

PROGRAM DAN KEGIATAN		RENCANA PAGU ANGGARAN TA. 2020 (Rp)	RENCANA PAGU ANGGARAN TA. 2020 (Rp)	SELISIH	Keterangan
		<i>Renja 2020</i>	<i>RKPD 2020</i>		
I Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan		234,857,500,000	126,830,000,000	(108,027,500,000)	
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	119,830,000,000	66,300,000,000	(53,530,000,000)	
2	Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	10,960,000,000	6,540,000,000	(4,420,000,000)	
3	Penatagunaan Kawasan Permukiman	2,900,000,000	1,850,000,000	(1,050,000,000)	
4	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	57,750,000,000	36,200,000,000	(21,550,000,000)	
5	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	6,987,500,000	3,010,000,000	(3,977,500,000)	
6	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	1,430,000,000	3,430,000,000	2,000,000,000	
7	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	35,000,000,000	9,500,000,000	(25,500,000,000)	
II Program Keciaptakarya		183,079,000,000	78,849,000,000	(104,230,000,000)	
8	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	80,950,000,000	35,650,000,000	(45,300,000,000)	
9	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	24,300,000,000	5,350,000,000	(18,950,000,000)	
10	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	20,950,000,000	11,000,000,000	(9,950,000,000)	
11	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	44,479,000,000	13,449,000,000	(31,030,000,000)	
12	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakarya	12,400,000,000	13,400,000,000	1,000,000,000	
III Program Penataan Bangunan dan Lingkungan		914,780,485,700	717,540,600,000	(197,239,885,700)	
13	Pengelolaan gedung strategis Provinsi	95,800,000,000	27,500,000,000	(68,300,000,000)	
14	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	797,800,000,000	668,600,000,000	(129,200,000,000)	
15	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	15,739,885,700	16,000,000,000	260,114,300	
16	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	5,440,600,000	5,440,600,000	-	
IV Program Tata Kelola Pemerintahan		14,495,030,890	15,308,100,000	813,069,110	
17	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	265,000,000	350,000,000	85,000,000	
18	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1,900,000,000	1,900,000,000	-	
19	Penyediaan Barang dan Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	10,850,000,000	11,358,100,000	508,100,000	
20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	1,120,030,890	1,200,000,000	79,969,110	
21	Peningkatan Kapasitas Aparatur	200,000,000	300,000,000	100,000,000	
22	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	160,000,000	200,000,000	40,000,000	
TOTAL ANGGARAN TA 2020		1,347,212,016,590	938,527,700,000	(408,684,316,590)	

KEPALA DINAS,



Ir. H. MOH. YANUAR, MP

NIP. 19610101 198802 1 001

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN 2020

PROVINSI : BANTEN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET		PAGU	KETERANGAN
	URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
I		Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Luas Kawasan Kumuh yang ditata	274.46	Ha					target komulatif
						Peningkatan Kualitas 1 Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	98.33	Ha	66,300,000,000	target tahunan
						1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Banten	98.33	Ha	66,300,000,000	
						Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 1 Kumuh Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	14.66	Ha	9,000,000,000	
						2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	12.00	Ha	8,000,000,000	
						Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 3 Kumuh Desa Kalanganyar Kec. Labuan Kab. Pandeglang	12.00	Ha	8,000,000,000	
						Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 4 Kumuh Desa Rancasenang Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	14.00	Ha	9,000,000,000	
						5 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Terondol Kec. Serang Kota Serang	13.59	Ha	4,000,000,000	
						6 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Tnjung Anom Kec. Msuk Kab. Tangerang	6.30	Ha	6,300,000,000	
						Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 7 Kumuh Kel. Pamulang Timur Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan	12.00	Ha	8,000,000,000	
						Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 8 Kumuh Kel. Larangan Utara Kec. Larangan Kota Tangerang	13.78	Ha	9,000,000,000	
						9 Pembangunan Kampung KB Tulip Desa Pasing Angin Kecamatan Cikarai Kota Cilegon	1.00	lokasi	2,000,000,000	Usulan BKKBN Provinsi Banten

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET		PAGU	KETERANGAN
						10 Pembangunan Sarana Prasarana Dukungan Kawasan Pengentasan Stunting, (Kab. Lebak, Kab. Pandeglang)	2.00	lokasi	2,000,000,000	Usulan DinKes Provinsi Banten
						11 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kota Serang	12.00	ruas	500,000,000	Usulan Dperkim Kota Serang
						12 Infrastruktur Kawasan Kumuh Kab. Lebak	1.00	lokasi	500,000,000	Usulan Dinas PERKIM Kab. Lebak
					2 Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman		10.00	dok	7,439,470,000	
						1. Perencanaan Teknis bidang kawasan permukiman	10.00	dok	4,300,000,000	
						1 DED Penangan Kawasan Kumuh di Kab. Pandeglang	2.00	dok	800,000,000	
						2 DED Penangan Kawasan Kumuh Kab. Serang	2.00	dok	800,000,000	
						3 DED Penangan Kawasan Kumuh Kota Serang	2.00	dok	800,000,000	
						4 DED Penangan Kawasan Kumuh Kota Tangerang Selatan	2.00	dok	800,000,000	
						5 DED Penangan Kawasan Kumuh Kota Tangerang	2.00	dok	800,000,000	
						6 Pendampingan Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	1.00	dok	300,000,000	
						2. Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	12.00	dok	3,139,470,000	
						1 Pengawasan Teknis Peningakatan Kualitan Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Muara Ciujung Barat Kec, Rangkasbitung Kab. Lebak	1.00	dok	404,100,000	
						2 Pengawasan Teknis Peningakatan Kualitan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang	1.00	dok	359,200,000	
						3 Pengawasan Teknis Peningakatan Kualitan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Karanganyar Kec. Labuan Kab. Pandeglang	1.00	dok	359,200,000	
						4 Pengawasan Teknis Peningakatan Kualitan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Rancaseneng Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	1.00	dok	404,100,000	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME	TARGET		KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET		PAGU	KETERANGAN
							5 Pengawasan Teknis Peningakatan Kualitan Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Trondol Kec. Serang Kota Serang	1.00	dok	216,400,000	
							6 Pengawasan Teknis Peningakatan Kualitan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Tanjunganom Kec. Mauk Kab. Tangerang	1.00	dok	282,870,000	Diusulkan di SIMLARAS
							7 Pengawasan Teknis Peningakatan Kualitan Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Pamulang Timur Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan	1.00	dok	359,200,000	
							8 Pengawasan Teknis Peningakatan Kualitan Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Larangan Utara Kec. Larangan Kota Tangerang	1.00	dok	404,100,000	Diusulkan di SIMLARAS
							9 Pembangunan Kampung KB Tulip Desa Pasing Angin Kecamatan Cikarai Kota Cilegon	1.00	dok	129,400,000	
							10 Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Dukungan Kawasan Pengentasan Stunting, (Kab. Lebak, Kab. Pandeglang)	1.00	dok	129,400,000	
							11 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kota Serang	1.00	dok	45,750,000	
							12 Infrastruktur Kawasan Kumuh Kab. Lebak	1.00	dok	45,750,000	
						3	Penatagunaan Kawasan Permukiman	20.00	%	1,850,000,000	
							1. Penatagunaan Kawasan Permukiman	20.00	%	1,850,000,000	
							1 Pembinaan Peningkatan Kawasan Permukiman di Provinsi Banten	2.00	keg	250,000,000	
							2 Rapat Koordinasi Bidang Kawasan Permukiman	11.00	keg	200,000,000	
							3 Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	8.00	keg	400,000,000	
							4 Penataan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten	1.00	Paket	1,000,000,000	
		Cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman	33.33	%							
						4	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	310.00	Unit	30,200,000,000	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET		PAGU	KETERANGAN
						1 Pembangunan Perumahan	50.00	Unit	3,000,000,000	
						1 Pembangunan Perumahan	50.00	Unit	3,000,000,000	
						2 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	260.00	Unit	18,200,000,000	
						1 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	260.00	Unit	18,200,000,000	
						3 Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman	30.00	Lokasi	9,000,000,000	
						1 Peningkatan Kualitas PSU Permukiman	30.00	Lokasi	6,000,000,000	
						2 Mesjid Kab Kota	1.00	unit	3,000,000,000	
					Perencanaan dan 5 Pengawasan Teknis Perumahan		21	dok	3,051,680,000	
						1. Perencanaan Teknis Perumahan	2.00	dok	800,000,000	
						Pendataan Urusan Bidang PKP Provinsi Banten 1 (Rumah terkena bencana provinsi & program provinsi)	1.00	dok	350,000,000	
						Pendampingan Penyediaan Rumah bagi 2 masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi	1.00	keg.	150,000,000	
						3 Updating Penerapan SPM Perumahan	1.00	dok	100,000,000	
						4 Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pengawasan Perumahan	4.00	keg	200,000,000	
						2. Pengawasan Teknis Perumahan	19.00	dok	2,251,680,000	
						1 Pengawasan Pembangunan Perumahan	5.00	dok	194,100,000	
						2 Pengawasan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	8.00	dok	817,180,000	
						3 Pengawasan Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman	6.00	dok	711,000,000	
						4 Pengawasan Bantuan PSU Permukiman MBR	1.00	dok	129,400,000	
						5 Pendampingan Peningkatan Kualitas RTLH & PSU	1.00	keg.	400,000,000	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME	TARGET		KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET		PAGU	KETERANGAN
						Penatagunaan 6 Pengembangan Perumahan		20.00	%	3,430,000,000	
							1. Penatagunaan Pengembangan Perumahan	20.00	%	3,430,000,000	
							1 Penataan Pengembangan Perumahan	1.00	keg	1,000,000,000	
							2 Pelaksanaan Pokja PKP Provinsi Banten	1.00	keg	430,000,000	
							3 Bantuan PSU Permukiman MBR	10.00	lokasi	2,000,000,000	
						7 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan		6,428.57	M2	4,500,000,000	
							1. Pengadaan Lahan	6,428.57	M2	4,500,000,000	
							1 Pengadaan Lahan Perumahan	6,428.57	M2	4,500,000,000	
	URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
II		Program Keciptakarya	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum	81.24	%						
						8 Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih		4.00	lokasi	15,650,000,000	
							1. Pembangunan Infrastrktur SPAM Lintas Daerah	1.00	lokasi	10,000,000,000	
							1 Pembangunan Intake & Jaringan Pipa Distribusi WTP Sindangheula	1.00	lokasi	10,000,000,000	Untirta
							2. Pembangunan Infrastrktur SPAM di Kawasan Strategis	3.00	kawasan	5,600,000,000	
							1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Sawarna	1.00	kawasan	1,000,000,000	
							2 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kawasan Strategis Provinsi (pantai selatan terpadu)	1.00	kawasan	1,000,000,000	
							3 Pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan	1.00	lokasi	3,600,000,000	
							3 Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Air Minum	1.00	keg	50,000,000	
							1. Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Air Minum	1.00	keg	50,000,000	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME	TARGET		KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET		PAGU	KETERANGAN
			Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi	79.19	%						
						9 Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi		3.00	lokasi	5,350,000,000	
							1. Pembangunan Infrastruktur Sanitasi di Kawasan Strategis	3.00	lokasi	5,200,000,000	
							1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Sawarna	1.00	kawasan	1,000,000,000	
							2 Pembangunan IPAL Komunal	1.00	lokasi	3,200,000,000	
							3 Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Kawasan Strategis Provinsi (pantai selatan terpadu)	1.00	kawasan	1,000,000,000	
							2. Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan	2.00	keg	150,000,000	
							1. Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pengembangan Sanitasi Lingkungan	1.00	keg	50,000,000	
							2. Sosialisasi Kegiatan Penyediaan Sanitasi	1.00	keg	100,000,000	
			Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional	20	%						
						10 Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan		2.00	lokasi	11,000,000,000	
							1. Pembangunan Infrastruktur Persampahan Regional	1.00	lokasi	10,000,000,000	
							1. Pembangunan Jalan Akses TPST Bojong Menteng	1.00	lokasi	10,000,000,000	
							2 Pembangunan Infrastrktur Persampahan di Kawasan Strategis	1.00	lokasi	1,000,000,000	
							1 Pembangunan Sarana Prasarana Persampahan Kawasan Strategis Provinsi (pantai selatan terpadu)	1.00	lokasi	1,000,000,000	
						11 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman		24.00	dok	14,135,380,000	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET		PAGU	KETERANGAN
						1. Perencanaan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya-an	4.00	dok	1,000,000,000	
						1 Updating Master Plan KP3B	1.00	dok	100,000,000	
						2 DED Depo Arsip	1.00	dok	200,000,000	
						3 Updating Penerapan SPM PUPR (Bidang Cipta Karya)	1.00	dok	100,000,000	
						4 Kajian UPT Air Minum	1.00	dok	200,000,000	
						5 Pendampingan Perencanaan Teknis Bidang Cipta Karya	1.00	Ls	400,000,000	
						2. Pembinaan Perencanaan Teknis Ke-Ciptakarya-an	20.00	%	500,000,000	
						1 Pelatihan Perencanaan Infrastruktur KeCiptaKarya-an	1.00	keg	150,000,000	
						2 Pendataan Urusan Bidang Cipta Karya Provinsi Banten	1.00	dok	350,000,000	
						3. Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya-an	20.00	dok	12,265,380,000	
						1 Pengawasan Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Distribusi WTP Sindangheula	1.00	dok	762,000,000	
						2 Pengawasan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Sawarna	1.00	dok	77,200,000	
						3 Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kawasan Strategis Provinsi (pantai selatan terpadu)	1.00	dok	77,200,000	
						4 Pengawasan Pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan	1.00	dok	194,760,000	
						5 Pengawasan Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Sawarna	1.00	dok	77,200,000	
						6 Pengawasan Pembangunan IPAL Komunal	1.00	dok	173,120,000	
						7 Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Kawasan Strategis Provinsi (pantai selatan terpadu)	1.00	dok	77,200,000	
						8 Pengawasan Pembangunan Jalan Akses TPST Bojong Menteng	1.00	dok	449,000,000	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME	TARGET		KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET		PAGU	KETERANGAN
							9 Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Persampahan Kawasan Strategis Provinsi (pantai selatan terpadu)	1.00	dok	77,200,000	
							10 Pengawasan Pembangunan Gedung OPD berikut pekerjaan Non Standar lainnya	1.00	dok	1,128,600,000	
							11 Pengawasan Pembangunan Gedung BPKP Perwakilan Provinsi Banten	1.00	dok	1,347,500,000	
							12 Pengawasan Lanscape Gedung 5 OPD	1.00	dok	270,500,000	
							13 Pengawasan Penataan Tugu Batas (Cipanas, Ciputat)	1.00	dok	36,600,000	
							14 Pengawasan Penataan Cikadueun (Syech Mansur)	1.00	dok	359,200,000	
							15 Pengawasan Penataan Caringin (Syech Asnawi)	1.00	dok	359,200,000	
							16 Pengawasan Pembangunan Kawasan Ciputri Banten Lama (Baitul Qur'an)	1.00	dok	806,000,000	
							17 Pengawasan Pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre (Multiyears, Desain n build)	1.00	dok	5,400,000,000	
							18 Pengawasan Penataan Landmark Kawasan Strategis	1.00	dok	129,400,000	
							19 Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Strategis Sawarna	1.00	dok	270,500,000	
							20 Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Strategis Provinsi (Pantai selatan Terpadu)	1.00	dok	77,200,000	
							21 Sarana Prasarana Pengembangan Wisata Gn. Pinang	1.00	dok	115,800,000	
							4. Pembinaan Pengawasan Teknis Ke-Ciptakarya-an	20.00	%	125,000,000	
							1 Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Sanitasi & Air Bersih Bidang Infrastruktur Permukiman	1.00	keg	100,000,000	
							2 Kompilasi Data Pengawasan Infrastruktur Permukiman	1.00	dok	25,000,000	
							5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Permukiman	20.00	%	245,000,000	
							1. Pelatihan Manajemen Quality Control Perencanaan Dan Pengawasan Infrastruktur Permukiman	1.00	keg	100,000,000	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME	TARGET		KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET		PAGU	KETERANGAN
							2. Penyusunan Profil Teknis Perencanaan & Pengawasan Infrastruktur Permukiman	1.00	keg	30,000,000	
							3. Bimbingan Teknik Updating AHSP Bidang Cipta Karya	1.00	keg	100,000,000	
							4. Penyusunan Laporaan Kinerja Kegiatan	1.00	keg	15,000,000	
						12 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan		8,444.44	m2	8,400,000,000	
							1. Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan	8,444.44	m2	8,400,000,000	
							1. Pembebasan Lahan WTP Dan Jaringan Pipa Distribusi Hilir Ciujung	2,000.00	m2	2,000,000,000	
							2. Pembebasan Lahan Intake WTP Sindang Heula	2,000.00	m2	1,400,000,000	
							3. Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B	4,444.44	m2	4,000,000,000	
							4. Biaya penanganan dampak sosial TPST	1.00	Ls	1,000,000,000	
III		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi	83	%						
						13 Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi		2.00	Gedung	66,000,000,000	
							1. Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi	2.00	Gedung	65,900,000,000	
							1. Pembangunan Gedung OPD berikut pekerjaan Non Standar lainnya	1.00	Gedung	22,000,000,000	
							2. Lanscape Gedung 5 OPD	5.00	Gedung	5,000,000,000	
							3. Pembangunan Gedung BPKP Perwakilan Provinsi Banten	1.00	Gedung	38,500,000,000	
							4. Penataan Tugu Batas (Cipanas, Ciputat)	2.00	Unit	400,000,000	
							2. Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1.00	keg	100,000,000	
							1. Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1.00	keg	100,000,000	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME	TARGET		KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET		PAGU	KETERANGAN
			Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	75	%						
						14 Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi		8.00	kawasan	664,600,000,000	
							1. Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	8.00	kawasan	664,500,000,000	
							1 Penataan Wisata Religi Cikadueun (Syech Mansur)	1.00	kawasan	8,000,000,000	
							2 Penataan Wisata Religi Caringin (Syech Asnawi)	1.00	kawasan	8,000,000,000	
							3 Pembangunan Kawasan Ciputri Banten Lama (Baitul Qur'an)	1.00	kawasan	20,000,000,000	
							4 Pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre (Multiyears, Desain n build)	1.00	kawasan	619,000,000,000	
							5 Penataan Landmark Kawasan Strategis	1.00	kawasan	2,000,000,000	
							6 Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Strategis Sawarna	1.00	kawasan	5,000,000,000	Usulan DPUPR Kab. Lebak
							7 Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Strategis Provinsi (Pantai selatan Terpadu)	1.00	kawasan	1,000,000,000	
							8 Sarana Prasarana Pengembangan Wisata Gn. Pinang	1.00	kawasan	1,500,000,000	Usulan Dinas Pariwisata Prov Banten
							2. Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1.00	keg	100,000,000	
							1. Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1.00	keg	100,000,000	
			Persentase penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	100	%						
						15 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis		100.00	%	16,000,000,000	
							1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	100.00	%	16,000,000,000	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME	TARGET		KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET		PAGU	KETERANGAN
							1 Pemeliharaan KP3B	1.00	keg	14,000,000,000	
							2 Pemeliharaan Banten Lama	1.00	keg	2,000,000,000	
						16 Penataan Sarana dan Prasarana Sarana Kawasan Strategis		1	keg	5,440,600,000	
							1 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	1	keg	5,440,600,000	
IV		Program Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	%						
						17 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		22.00	dok	350,000,000	
							1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	17.00	dok	270,000,000	
							2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2.00	dok	55,000,000	
							3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3.00	dok	25,000,000	
			Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100	%						
						18 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		34.00	dok	1,900,000,000	
							1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	3.00	dok	100,000,000	
							2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9.00	dok	800,000,000	
							3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	12.00	dok	100,000,000	
							4 Monitoring dan Evaluasi	4.00	dok	250,000,000	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME	TARGET		KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET		PAGU	KETERANGAN
							5 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	6.00	dok	650,000,000	
			Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100	%						
						19 Penyediaan Barang dan Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		12.00	Bln	11,130,570,000	
							1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	12.00	Bln	3,030,570,000	
							2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	12.00	Bln	4,000,000,000	
							3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12.00	Bln	3,700,000,000	
							4 Koordinasi an Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	12.00	Bln	400,000,000	
						20 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis		12.00	bln	1,200,000,000	
							1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	12.00	bln	1,200,000,000	
			Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	%						
						21 Peningkatan Kapasitas Aparatur		12.00	Bln	400,000,000	
							1. Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	12.00	Bln	50,000,000	
							2. Peningkatan Kompetensi Aparatur	12.00	Bln	350,000,000	
						22 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan		12.00	bln	200,000,000	
							1. Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD	12.00	bln	125,000,000	
							2. Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD	12.00	bln	75,000,000	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME	TARGET	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/ OUTPUT	TARGET		PAGU	KETERANGAN
					TOTAL				938,527,700,000	

KEPALA DINAS,



Ir. H. MOH. YANUAR, MP
NIP. 19610101 198802 1 001

**REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2020**

PROGRAM DAN KEGIATAN		RENCANA PAGU ANGGARAN TA. 2020 (Rp)	Keterangan
		<i>Renja Final 2020</i>	
I Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan		116,771,150,000	
	1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	66,300,000,000	
	2 Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	7,439,470,000	
	3 Penatagunaan Kawasan Permukiman	1,850,000,000	
	4 Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	30,200,000,000	
	5 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	3,051,680,000	
	6 Penatagunaan Pengembangan Perumahan	3,430,000,000	
	7 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	4,500,000,000	
II Program Keciaptakaryaan		54,535,380,000	
	8 Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	15,650,000,000	
	9 Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	5,350,000,000	
	10 Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	11,000,000,000	
	11 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	14,135,380,000	
	12 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan	8,400,000,000	
III Program Penataan Bangunan dan Lingkungan		752,040,600,000	
	13 Pengelolaan gedung strategis Provinsi	66,000,000,000	
	14 Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	664,600,000,000	
	15 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	16,000,000,000	
	16 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	5,440,600,000	
IV Program Tata Kelola Pemerintahan		15,180,570,000	
	17 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	350,000,000	
	18 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1,900,000,000	
	19 Penyediaan Barang dan Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	11,130,570,000	
	20 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	1,200,000,000	

PROGRAM DAN KEGIATAN			RENCANA PAGU ANGGARAN TA. 2020 (Rp)	Keterangan
	21	Peningkatan Kapasitas Aparatur	400,000,000	
	22	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	200,000,000	
TOTAL ANGGARAN TA 2020			938,527,700,000	

KEPALA DINAS,



Ir. H. MOH. YANUAR, MP

NIP. 19610101 198802 1 001